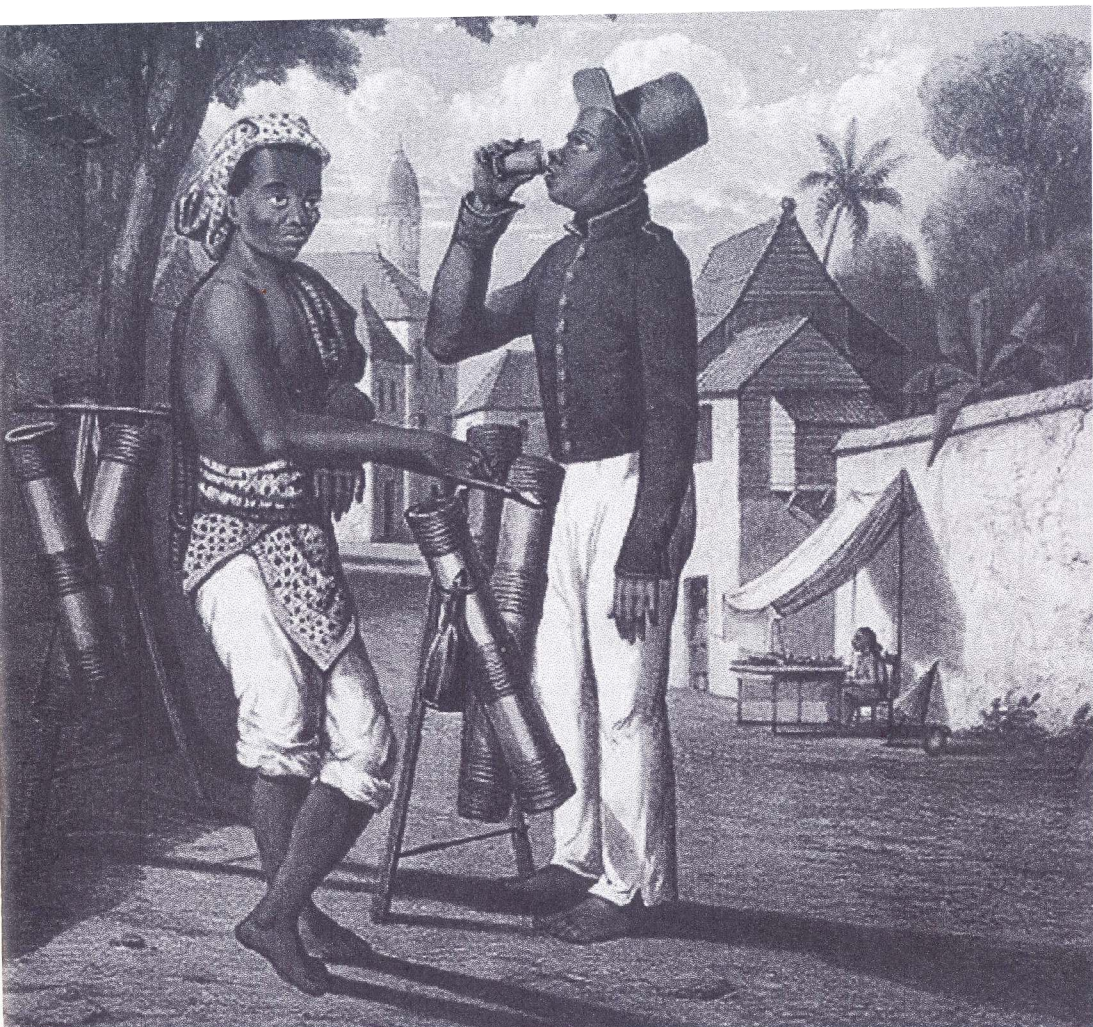




Diskusi Seni Rupa
Rabu, 16 September 2015

Lokal Akal-Akal

Albertus Rusputranto P.A.

Jurusan Seni Rupa Murni Fakultas Seni Rupa dan Desain
Institut Seni Indonesia Surakarta

Lokal Akal-Akal

Albertus Rusputranto P.A.

Perbincangan tentang perjumpaan lokal-global sudah sangat sering kita dengar dan lakukan. Baik dalam forum-forum diskusi ilmiah (di berbagai bidang) hingga obrolan santai di warung-warung wedangan. Dari sekian banyak forum, yang sering saya dengar adalah munculnya kesimpulan fantastik yang mengatakan bahwa kunci untuk menghadapi globalisasi (baik itu yang memaknainya sebagai ancaman atau keniscayaan jaman) adalah penguatan lokalitas.

Kesimpulan ini hampir selalu diterima oleh forum. Saya termasuk yang nyaris setuju. Tetapi sayangnya, dari sekian banyak perbincangan tersebut, kesan 'lokal' selalu tabal diidentikkan dengan 'tradisional' dalam pengertian identitas masa lalu. Akhirnya pendiskusi lokal-global ini terjebak pada *rasan-rasan* tentang tradisionalisme yang dioposisikan dengan globalisme (yang diidentikkan dengan modern, mutakhir dan atau "barat").

Tentu kita tahu bahwa banyak komunitas budaya kita sudah menjadi masyarakat kosmopolit jauh sebelum negara-bangsa kita terbentuk. Tentu kita juga tahu bahwa globalisasi ini berbeda dengan kondisi kosmopolit era pra kolonial. Globalisasi pasca kolonial ditopang kuat oleh kapitalisme global yang semakin hari semakin canggih dan majemuk. Tetapi mestinya kita, hari-hari ini, juga bisa merasakan bagaimana teknologi informasi-komunikasi (dan transportasi) telah memungkinkan kita, orang per orang, menjadi bagian dari masyarakat dunia (dan berpotensi melakukan negosiasi terhadap kapitalisme global lewat gerakan-gerakan sosial yang parsial dan organik: gerakan sosial baru).

Sedikitnya ada dua bentuk sikap naïf, yang mengemuka di masyarakat kita, dalam merespon globalisme ini: yang pertama, merayakannya sebagai

keniscayaan dan kemajuan jaman tanpa merasa perlu memahami kuasa apa yang menggerakkannya dan bagaimana kuasa tersebut memposisikan kita; yang kedua, sebaliknya, sangat khawatir dan menganggap globalisasi sebagai ancaman terhadap identitas "asli".

Kedua sikap ini menarik diperhatikan sebagai fenomena masyarakat poskolonial, masyarakat bangsa bekas jajahan yang sampai sekarang, kebanyakan, secara psikologis masih mewarisi dampak-dampak penjajahan. Dampak penjajahan yang cukup kuat mencengkeram kebanyakan kita hingga saat ini di antaranya adalah *inferiority complex* (mental inferior), terutama ketika dihadapkan dengan apa-apa saja yang berasal dari "barat".

Inferiority complex inilah yang memunculkan dua sikap naif di atas: menerima dengan sepenuh hati atau sebaliknya, sangat anti. Contoh sehari-hari dari mentalitas ini misalnya, ketika kita (atau teman kita) mempunyai pacar atau pasangan hidup orang "barat" maka kita, meskipun ini diekspresikan sebagai candaan, menilainya sebagai upaya memperbaiki keturunan. Candaan ini (kalau ini disampaikan sebagai candaan) menunjukkan bahwa kita mengakui/menyatakan keberadaan kita lebih buruk dibandingkan orang "barat" yang menjadi pasangan kita (atau teman kita).

Bangunan poskolonial inilah yang membuat saya merasa perlu memberikan tanda petik di antara kata 'barat' dalam tulisan ini. Tanda petik menunjuk bahwa apa yang "barat" tidak sebenar-benarnya barat. Demikian pula akhirnya yang mereka ("barat") sebut sebagai "timur". Sekadar contoh: Amerika Serikat, yang disebut sebagai "barat", sebenarnya juga bisa dilihat sebagai negara yang terletak di sebelah timur Indonesia (artinya orang-orang Amerika Serikat seharusnya juga bisa menyebut Indonesia sebagai negara barat, sebab *de facto* negara kita memang terletak di sebelah barat mereka!), dan anehnya lagi, Australia yang terletak di sebelah selatan benua Asia (Asia Tenggara) juga dianggap "barat".

"Barat" dan "timur" adalah sebuah konsep pengklasifikasian, yang dibuat oleh "barat", untuk membedakan antara mereka yang merasa lebih beradab ("barat") dan yang mereka anggap kurang beradab ("timur"). "Timur" adalah konstruksi "barat". Identitas "timur" yang eksotik diciptakan oleh "barat" untuk mengukuhkan keberadaan dan keberadaban mereka ("barat"). Tradisi melihat "timur" dengan cara pandang "barat" ini disebut orientalisme. Teori ini diperkenalkan oleh Edward Said dalam bukunya yang juga diberinya judul *Orientalisme*, salah satu landasan terpenting munculnya wacana-wacana perlawanan (atau setidaknya negosiasi) terhadap dampak-dampak kolonial: poskolonial.

"Barat" adalah sebutan bagi bangsa-bangsa kolonial/bekas kolonial dari benua Eropa (Amerika Serikat belakangan), sedangkan "timur" adalah bangsa-bangsa terjajah/bekas jajahan yang berada di benua Asia dan Afrika (bentukan negara-negara bangsa di benua Amerika dan Australia mempunyai bentuk/karakter kolonisasi yang agak berbeda). Cara pandang orientalistik inilah yang mendasari semangat bangsa-bangsa Eropa melakukan penjelajahan yang akhirnya berujung pada penjajahan. Mereka menumbuhkan kesadaran tentang "aku" (*cogito ergo sum*) dan "liyan". Mereka mendudukkan "liyan" sebagai objek; "aku" sebagai yang beradab dan "liyan" yang harus ditaklukkan dan diperadabkan.

Cara pandang orientalistik ini tidak hanya bisa kita temui pada praktik-praktik penjelajahan saja tetapi lebih jauh lagi pada bangunan pengetahuan mereka, kaum orientalis. Antropologi klasik misalnya, merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang sangat orientalistik, yang sangat mendukung terjadinya penjelajahan yang berujung pada praktik penjajahan. Kalau kita membaca karya-karya sastra yang muncul di Eropa pada sekitaran abad 17-19 (terutama pada abad 19), kita bisa rasakan kentalnya ruh orientalisme di dalamnya. Karya sastra untuk anak yang

berjudul *Alice's Adventures in Wonderland* (*Alice in Wonderland*) misalnya. Alice, si anak perempuan berkulit putih dan berambut *blonde*, yang pergi menjelajah wilayah antah berantah lewat lobang kecil di sebuah batang pohon, merupakan representasi dari "aku" yang, dengan cara pandang orientalistik, melihat "liyan".

Orientalisme rupanya masih terus bertahan dan bahkan semakin subur selepas kolonialisme bangkrut dan runtuh. Dekolonisasi secara politik memang telah terjadi; negara-negara jajahan "barat" telah berhasil melepaskan diri dari kolonialisme dan *madeg* sebagai negara-negara merdeka (atau setidaknya menjadi negara-negara persemakmuran) tetapi dampak-dampak kolonialisme masih terus ada, mengakar dan terwariskan hingga sekarang.

Persoalannya sekarang, cara pandang orientalistik yang dulunya merupakan cara pandang "barat" melihat "timur" sekarang justru tumbuh subur di kepala orang-orang "timur". Aneh sebenarnya kalau kita pun melihat diri kita sendiri, yang telah "ditimurkan" oleh "barat", dengan cara pandang yang orientalistik. Tetapi demikianlah kenyataannya. Dan inilah satu bukti lagi bahwa dampak-dampak kolonial masih begitu kuat mencengkeram masyarakat kita, bahkan menjangkit pada generasi yang sama sekali tidak pernah mengalami hidup di era penjajahan.

Kuatnya cara pandang orientalistik di dalam masyarakat kita sendiri sangat ditentukan oleh mentalitas kita yang ternyata masih tetap inferior (*inferiority complex*) sehingga dengan senang hati kita menikmati hegemoni orientalisme, bahkan menganggap bangunan pengetahuan yang dikonstruksinya sebagai kebenaran yang sesungguhnya benar. Orientalisme menghegemoni kita lewat kuasa pengetahuan. Apa saja. Termasuk juga pengetahuan budaya dan kesenian.

Masyarakat kita, baik di tingkat elite (termasuk elite akademik) maupun yang digolongkan sebagai masyarakat kebanyakan, hari-hari ini begitu disibukkan dengan kegalauan identitas. Kalangan akademisi seni kita banyak yang juga mencoba meresistensi (untuk tidak menyebutnya menolak) konsep-konsep kesenian, estetika dan kebudayaan yang mereka anggap berasal dari luar konsep kebudayaan kita.

Mereka gambar-gemborkan nilai-nilai tradisi kebudayaan masa lalu, mencoba menciptakan narasi keadiluhungan kebudayaan nenek moyang dan secara sloganik menyerukan himbauan pelestarian. Sejalan dengan itu akhirnya mereka juga mengutuk generasi sekarang yang dianggap telah banyak melupakan tradisi dan budaya "asli" nenek moyang.

Tetapi yang seperti apa, atau yang bagaimana sebenarnya, yang bisa disebut sebagai, misalnya, Jawa (identitas) yang "asli" itu? Apakah mereka yang sering mengenakan blangkon (*blanco*), bentuk instan dari *destar* (*iket*), hasil ciptaan Tjan Tjoen Twan? Apakah mereka yang suka mendengarkan dan memainkan gamelan yang orkestrasinya sudah dipengaruhi estetika musik Eropa? Apakah mereka yang hidup di kampung Baluwarti, benteng yang dibangun oleh arsitek dari Portugis, dengan penamaan yang juga berbau Portugis (*baluwarti*, *baluarte*=benteng)? Apakah mereka yang suka menonton atau memainkan wayang kulit yang babon ceritanya diambil dari epos-epos India? Dan sebaliknya, apakah mereka, orang-orang Jawa sekarang, yang lebih suka mengenakan celana jeans dan bersepatu *Nike*, tidak Jawa?

Pertanyaan-pertanyaan retorik tersebut sama sekali tidak bermaksud menggembosi keyakinan kita akan identitas, kejawaan kita, tetapi agar kita bisa lebih memahami apa yang disebut sebagai Jawa. Identitas bukanlah bangunan masif yang sudah dari sejak dulunya begitu dan harus tetap begitu sepanjang masa. Identitas tentunya bukan persoalan asli atau tidak asli. Identitas

adalah bangunan yang terus-menerus menggerus dan membangun dirinya sendiri, dialektis. Dialektika inilah jantung identitas dan kebudayaan manusia.

Ania Loomba dalam bukunya *Kolonialisme/Pascakolonialisme* menceritakan perbedaan antara pakaian seragam tentara kolonial (Eropa) dan pakaian seragam tentara pribumi (bangsa terjajah) di negeri jajahan. Disebutkan dalam cerita tersebut, setelah terjadi modernisasi teknologi perang, pakaian seragam tentara Eropa di tanah jajahan menjadi semakin sederhana dan efektif. Sementara pakaian seragam tentara negara jajahan terlihat gagah, indah dan megah (melungsur tata berpakaian seragam tentara Eropa masa lalu, termasuk juga persenjataannya) tapi sangat tidak efektif digunakan untuk berperang dalam kancah perang-perang modern. Kegagahan para prajurit pribumi, dalam balutan pakaian-pakaian seragam mereka, kadang membuat para tentara kolonial iri melihatnya.

Mereka, para prajurit pribumi, memang sengaja didandani demikian. Mereka ditempatkan di ruang-ruang dan peristiwa-peristiwa ceremonial sebagai hiasan kolonial belaka. Dan lucunya mereka bangga. Mereka tidak tahu, atau mungkin memang tidak peduli, kalau sebenarnya kegagahan mereka ini semu. Mandul dalam kegagahan, *gabug*.

Politik berpakaian ini terjadi dimana-mana, di semua wilayah jajahan. Gunanya untuk melakukan kontrol sosial terhadap masyarakat bangsa jajahan. Kontrol sosial lewat cara berpakaian ini juga pernah diterapkan di Batavia, ibu kota Negara Hindia Belanda (nama negara-bangsa Indonesia sebelum merdeka). Kees van Dijk dalam artikelnya, yang disusun sebagai salah satu bunga rampai di buku kumpulan tulisan *Outward Appearances: Trend, Identitas, Kepentingan*, mengisahkan tentang aturan berpakaian yang harus dipatuhi oleh kaum pribumi dari segala

penjuru negara jajahan yang berada dan atau tinggal di Batavia. Mereka harus mengenakan pakaian khas daerah masing-masing. Kalau ada dijumpai yang tidak mematuhi peraturan ini bakal kena hukuman cambuk. Peraturan ini dibuat untuk kepentingan sensus dan kontrol keamanan (dengan tujuan memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi para *toewan*).

Desa Jawa, nama salah satu anjungan Hindia Belanda pada event pameran kolonial yang diselenggarakan di Paris, ramai didatangi pengunjung. Apa yang membuat anjungan ini menarik? Karena di situ dipamerkan keeksotikan Jawa. Kehadiran perempuan-perempuan Jawa yang, di mata para pengunjung (yang *notabene* adalah orang-orang Eropa jaman Victorian yang sedang mengagungkan kemegahan dan "ketertutupan" pakaian), terkesan primitif dengan "keterbukaan" pakaian mereka. Pameran ini menghadirkan "liyan" yang kurang beradab bagi si "aku" yang beradab; *Desa Jawa* adalah sebuah tontonan keprimitifan yang eksotik. Itulah mengapa anjungan Hindia Belanda ramai dikunjungi.

Masyarakat jajahan hidup dalam sanjungan, didudukkan sebagai aktor di "panggung-panggung kolonial", yang ternyata hanya tontonan-sajian hiburan bagi para *toewan*. Dan, sayangnya, mereka bangga. Seperti halnya gegap gempitanya kita menyambut keputusan UNESCO menjadikan keris dan wayang kulit sebagai warisan dunia; melupakan betapa sulitnya kita mengupayakan terwujudnya keinginan mempunyai industri otomotif sendiri (tidak ada ijin dari *ndara toewan* WTO).

Jadi ingat pernyataan Pramodya Ananta Toer, dalam sebuah tulisan pengantar. Dia prihatin dengan berjejalnya mobil yang ada di Jakarta: jalan tol, yang bisa muat sampai empat baris mobil saja bisa sebegitu padatnya, dan yang lebih membuatnya prihatin, tidak ada satu pun mobil produk dalam negeri di situ.

Mengapa wayang dan keris, produk budaya kita, bisa dijadikan produk warisan dunia sementara industri otomotif, yang tentunya juga bisa disebut sebagai produk budaya kita nantinya, tidak boleh berdiri? Alasannya sederhana, *ya* karena wayang dan keris tidak akan mengganggu pasar! Beda persoalan dengan industri otomotif; berapa banyak perusahaan otomotif multinasional yang bakal terancam pasar penjualannya bila industri otomotif dalam negeri ini benar-benar berdiri? Sudah terlalu banyak pisau untuk berbagi kue.

Seperti halnya pada jaman kolonial, kegiatan atau produk apa pun dipersilakan selama itu tidak mengganggu mekanisme pasar, bahkan bukan tidak mungkin justru dibantu, disokong dan didorong. Tetapi belum tentu kalau sudah berurusan dengan persoalan kapital. Akan sangat dihitung untung/ruginya.

Sekarang kita mulai menukik kembali pada persoalan perjumpaan lokal-global. Mengapa wacana ini begitu menggelisahkan kita? Mengapa kita harus menggebu-gebu berupaya mempertemukan lokalitas kita dengan yang global? Dan mengapa lokalisme dalam wacana perjumpaan lokal-global (glokalisasi, *think locally act globally*, dsb.) yang sering kita dengar dan bicarakan ini terasa sangat orientalistik?

Pemahaman kita tentang lokalitas selama ini diidentikkan dengan bangunan identitas yang kita bayangkan. Sayangnya bayangan kita tentang identitas ini terjebak pada pengagungan masa lalu yang sebenarnya juga tidak sefantastik yang kita bayangkan. Bentuk identitas yang sering kita pakai, yang kita anggap "asli", sebenarnya tidak pernah benar-benar asli. Kondisi bangsa-bangsa di nusantara pra Indonesia (sebelum memasuki era penjajahan) saja sudah sangat kosmopolit. Masyarakat Jawa era kerajaan Majapahit, salah satu negara kerajaan yang pernah berjaya di nusantara ini, sudah sangat akrab

dengan berbagai bentuk kebudayaan bangsa-bangsa lain, baik lewat kehadiran orang-orang dari berbagai bangsa maupun dari berbagai ekspedisi lintas negara yang dilakukan. Saling mempengaruhi.

Denys Lombard, dalam bukunya *Nusa Jawa Silang Budaya*, bahkan menginformasikan bahwa pada abad 1 SM, Ptolomeus, sejarawan Mesir, mencatat sudah ada hubungan perdagangan antara orang-orang di nusantara dengan bangsa-bangsa di Afrika. Orang-orang dari nusantara banyak yang membeli budak dari Afrika untuk dibawa pulang.

Akhirnya banyak sekali produk budaya kita, yang masih bisa dijumpai sekarang, yang kalau dirunut akar keterpengaruhannya tidak lagi bisa disebut asli. Beberapa jenis tanaman bahan makanan kita saja banyak yang kita kenal dari kebudayaan bangsa lain. Dan ini bukan kondisi khas kebudayaan kita. Intertekstualitas kebudayaan ini terjadi di seluruh bangunan kebudayaan bangsa-bangsa di dunia.

Tapi, apakah ada pengaruh kebudayaan kita pada bangunan kebudayaan bangsa lain? Tidak sedikit. Salah satu di antaranya di Afrika Selatan. Kebudayaan bangsa Afrika Selatan banyak mendapat pengaruh dari kita lewat, di antaranya yang pernah tercatat, penyebaran agama Islam yang salah satunya dilakukan oleh ulama besar dari Makassar, syeh Yusuf.

Kolonialisme adalah bentuk intertekstualitas kebudayaan yang agak berbeda. Ada dominasi kebudayaan yang kuat, yang tingkat keberhasilannya juga ditopang oleh penerimaan masyarakat bangsa-bangsa yang terjajah itu sendiri. Hegemoni budaya yang ditancapkan oleh kolonialisme ini berdampak pada mentalitas bangsa-bangsa terjajah: mental terjajah, mental inferior. Dampak yang terus terwariskan hingga sekarang.

Mental inferior inilah yang banyak melandasi bangunan tradisionalisme kita. Kuntowidjojo dalam

bukunya *Raja, Priyayi dan Kawula* memaparkan fenomena dunia malam (pelembagaan kejawen) yang banyak dipraktikkan oleh orang-orang Jawa (secara berkelompok) sejak jaman kolonial. Fenomena ini muncul sebagai bentuk pelarian dari penguasaan dunia siang yang dijalankan oleh kaum kolonialis.

Kepentingan publik, misalnya pemerintahan dan berbagai hal yang berkait dengan pemenuhan kebutuhan publik, dijalankan dan diatur regulasinya oleh para *toewan* dan perangkat-perangkatnya. Tidak ada ruang dan kesempatan lagi bagi kaum pribumi. Maka mereka mengambil dunia malam sebagai medan untuk mengekspresikan rasa hadir, eksistensi, mereka. Ini adalah cerminan masyarakat yang kalah.

Dari dunia malam inilah muncul pembayangan-pembayangan identitas yang disandarkan pada kebudayaan masa lalu; dari dunia malam inilah muncul upaya untuk mengatur apa-apa saja yang bersifat pribadi, misalnya ilmu *katuranggan* yang mengatur estetika perempuan Jawa; dan dari dunia malam inilah muncul upaya untuk memasifkan identitas Jawa. Produk dunia malam ini didukung oleh kaum kolonialis. Bukan hanya didukung tetapi juga disokong. Mengapa? Karena dengan demikian langgenglah kuasa kaum kolonialis dengan penguasaan dunia siang yang lebih nyata.¹⁾

Bangunan identitas Jawa produk dunia malam ini terwariskan hingga sekarang. Ketidakhadiran kita di ruang publik memunculkan pembayangan keadiluhungan identitas "asli". Maka tidak aneh kalau kita masih dan terus membawa-bawa kejayaan nenek moyang (lokalitas) untuk menutupi "ketidakhadiran" kita sekarang di ruang publik yang lebih luas, globalitas.

¹⁾ Pernyataan ini tidak bermaksud menafikkan keberadaan beberapa orang anak bangsa yang mampu hadir di kancah publik dan atau sejajar dengan para *toewan*.

Tidak keliru kita berbangga dengan keberadaan Borobudur, yang kita klaim sebagai produk warisan nenek moyang, yang pernah tercatat sebagai satu dari tujuh keajaiban dunia. Tetapi kita juga harus ingat bahwa wangsa Syailendra tidak membangun Borobudur (abad 8) untuk diwariskan kepada orang-orang Indonesia. Mereka bahkan tidak pernah tahu kalau 1300-an tahun yang akan datang, wilayah kerajaannya akan menjadi bagian dari negara bangsa yang bernama Indonesia.

Simbah kita boleh saja orang yang paling kaya di desa, tanah dan sawahnya sangat luas. Semua orang tunduk dan hormat. Leluhur kita boleh saja bangsawan atau bahkan raja yang sangat berkuasa. Tetapi persoalannya sekarang, siapa kita saat ini? Kondisi nyata kita sekarang seperti apa? Kalau sekarang kita *kere, ya kere*. Dan atau sebaliknya, *simbah* kita dulu boleh saja budak, tetapi kalau sekarang kita jadi tuan *ya* itulah kita, tuan. Tentu tanpa mengabaikan sejarah. Kesadaran akan sejarah membuat kita makin dan semakin beradab; manusia adalah makhluk yang menyejarah.

Malaysia boleh lebih berbangga dengan menara kembar Petronasnya dibandingkan kita dengan Borobudur. Sejelek-jeleknya menara Petronas, dua bangunan megah tersebut dibuat pada era Malaysia oleh orang-orang Malaysia, sementara Borobudur tidak dibuat oleh orang Indonesia, tidak di era Indonesia!

Kecenderungan kita sekarang mengagung-agungkan masa lalu, menganggapnya sebagai identitas "asli" nenek moyang, cilakanya justru mengusung bentuk yang paling permukaan dari bangunan identitas kita yang orientalistik; yang dibangun pada era kejayaan kolonialisme di nusantara (abad 19-20an awal), di bawah bayang-bayang "keagungan" kebudayaan para *toewan*. Inilah wajah tradisionalisme kita sekarang. Inilah bayangan lokalitas kita sekarang. Maka bukan tidak mungkin lokalisme yang kita bayangkan adalah ekspresi bawah sadar kita yang inferior (*inferiority complex*). Buah dampak kolonialisme.

Tidak jauh berbeda dengan pelembagaan bangunan tradisionalisme kita, ungkapan perjumpaan lokal-global ini juga sangat beraroma *inferiority complex*. Dalam ungkapan tersebut tersirat upaya kita untuk mendapatkan pengakuan dari pihak lain; pengakuan atas keberadaan kita yang lokal dan tradisional ("liyan") sesuai dengan cara pandang mereka yang orientalistik ("aku").

Kita sering lupa bahwa apa-apa yang dianggap global memang hampir selalu bersumber dari yang lokal. Kita sering lupa kalau bahasa Inggris bukanlah bahasa Internasional. Bahasa Inggris *ya* bahasanya bangsa Inggris (lokal), yang kemudian disepakati menjadi salah satu bahasa Internasional (global) yang digunakan, setidaknya atas kesepakatan bangsa-bangsa yang tergabung dalam PBB. Facebook awalnya hanya digunakan sebagai media untuk saling menyapa antar mahasiswa di kampus tempat penciptanya, Mark Zuckerberg, bersekolah. Akademi, fakultas, universitas, kalender, angka, huruf latin, jas, sendok, piring, kanvas, pigura, demokrasi, agama dan jutaan lagi yang lain, baik produk, peristiwa maupun ide, bersumber dari yang lokal. Bahkan, dalam bukunya yang berjudul *Masyarakat Post-Tradisional*, Anthony Giddens menuliskan bahwa kecanggihan teknologi informasi-komunikasi sekarang membuat tindakan yang paling pribadi pun bisa berdampak global.

Akhirnya, persoalan perjumpaan lokal-global ini, bagi kita, seharusnya adalah persoalan kesadaran memutuskan dampak-dampak kolonialisme yang selama ini terwariskan, menghilangkan *inferiority complex*, membangun rasa percaya diri yang dibarengi dengan kemampuan hadir (eksistensi) di ruang publik global dan menjadi bagian dari masyarakat dunia yang bersahaja. Bukan persoalan bangunan identitas seperti yang selama ini kita gembar-gemborkan, yang ternyata sangat orientalistik, berorientasi pada masa lalu dan dilandasi oleh mental inferior.

Jadi, apakah kita harus larut dalam globalisme tanpa sikap kritis atau anti terhadapnya? Tidak keduanya. Kedua sikap tersebut merupakan bentuk ambivalensi mental terjajah. Perjumpaan lokal-global akhirnya adalah sekadar penamaan lain dari peristiwa intertekstual budaya, medan tarik ulur berbagai kepentingan dan kuasa masyarakat dunia.

Jagalan, 15 Agustus 2015